

Nomor : B/439/RB.06/2022

7 Maret 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi  
Tahun 2021

Yth. Bupati Kendal  
di

Kendal

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021 adalah **64,25** dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20,00	11,05	11,51
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,76	5,93
	III. Reform	30,00	14,48	14,90
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>31,28</b>	<b>32,34</b>

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,52	7,64
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,28	8,57
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,55	8,05
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,08	7,65
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>32,43</b>	<b>31,91</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100,00</b>	<b>63,70</b>	<b>64,25</b>

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan upaya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan upaya implementasi reformasi birokrasi dari tahun sebelumnya.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Kendal, sebanyak 8 (delapan) hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	ASN Profesional	0-100	74,99 (Sedang)	Badan Kepegawaian Negara
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,27 (Baik)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	46,85 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,34	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.	Kapabilitas APIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	69,55 (Baik)	Arsip Nasional Republik Indonesia
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	72,88	Ombudsman RI

Dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara dan penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021.

3. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal diantaranya sebagai berikut:
  - a. Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, sehingga hasil dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan atau isu dalam organisasi;

- b. Belum adanya mekanisme yang jelas untuk *reward and acknowledgement* bagi agen perubahan apabila proyek perubahannya berhasil. Lebih lanjut belum dilakukan evaluasi atas *impact* hasil perubahan yang diusulkan oleh agen perubahan bagi capaian kinerja organisasi;
  - c. Dalam merumuskan kebijakan belum dilakukan pemetaan seberapa besar dampak atau hasil yang akan dihasilkan oleh kebijakan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan;
  - d. Belum dilakukan langkah-langkah awal identifikasi untuk mengetahui pola koordinasi dan pola rentang kendali sebagai implikasi dari penyederhanaan birokrasi;
  - e. Belum dilakukan identifikasi/reviu yang komprehensif untuk memastikan bahwa peta proses bisnis dan SOP telah sesuai dengan kinerja utama organisasi, utamanya setelah dilakukan penyederhanaan organisasi;
  - f. Belum dilakukan *assessment* kepada seluruh pegawai untuk memetakan gap kompetensi termasuk untuk mendukung *merit system* dalam rangka mendukung manajemen talenta pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - g. Peta kerangka logis yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka memastikan perencanaan selaras di setiap level organisasi belum optimal disusun;
  - h. Peta risiko/manajemen risiko belum dibangun secara optimal dalam rangka pengawalan pencapaian kinerja utama organisasi;
  - i. Efektifitas atas inovasi-inovasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal belum dinilai secara berkala dalam menjamin bahwa pelayanan sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat
4. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kendal memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	66,31	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	85,70	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	80,45	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	79,93	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Memastikan rencana aksi Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu perlu memastikan keselarasan antara rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik;
2. Melakukan evaluasi atas ketercapaian proyek perubahan agen perubahan terhadap kinerja utama organisasi. Sehingga proyek perubahan yang dibangun memang benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, perlu didorong adanya mekanisme pemberian penghargaan bagi agen perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya;
3. Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal harus mampu menunjukkan dampak yang positif bagi masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) untuk menjamin efektifitas dari kebijakan-kebijakan yang disusun;
4. Melakukan langkah awal identifikasi atas pola koordinasi antar jabatan baik yang struktural maupun fungsional yang jelas dan tidak tumpang tindih sehingga bentuk struktur organisasi yang baru mampu menunjang kinerja utama organisasi;
5. Melakukan identifikasi/reviu kembali atas peta proses bisnis dan SOP dan memastikan seluruh proses bisnis dan SOP telah sesuai dengan kinerja utama organisasi;
6. Melakukan *assessment* kepada seluruh pegawai secara berkala sehingga dapat dipetakan potensi-potensi sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan kedepan dapat dibangun *talent pool* yang efektif guna mendukung kebutuhan kinerja utama organisasi;
7. Memperbaiki penjenjangan kinerja dengan memperhatikan model logis yang benar agar mendapatkan proses/aktivitas yang tepat dan berdampak bagi kinerja organisasi;
8. Peta risiko yang telah ada perlu untuk direviu, guna memastikan bahwa seluruh potensi yang menghambat pencapaian kinerja utama telah dipetakan dan lingkungan pengendaliannya telah dibangun;
9. Perlu dilakukan penilaian keberhasilan dari penerapan inovasi yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Selain itu, untuk menjamin percepatan perbaikan pelayanan publik di seluruh perangkat daerah maka dapat didorong untuk melakukan replikasi atas inovasi antar perangkat daerah yang dinilai berhasil antar perangkat daerah.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

*Erwan Agus Purwanto*  
**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah.